

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING DI UNIT PELAKSANA TEKNIS KELUARGA BERENCANA KECAMATAN CIPEUNDEUY KABUPATEN BANDUNG BARAT

Oleh

Hafid Maulana Akbar Al-Husen¹⁾ Fadlan Abdillah Salam²⁾ Farhan Fathur Rohman³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Al-Ghifari

E-mail : maulanakh88@gmail.com ¹⁾ fadlanabdie@gmail.com ²⁾ farhanfarohman@gmail.com³⁾

ABSTRAK. Tingginya angka stunting di Kabupaten Bandung Barat menjadi alasan peneliti untuk mengkaji tentang kebijakan Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dalam Pencegahan Stunting di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat. Diharapkan dengan adanya implementasi kebijakan Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dalam Pencegahan Stunting di Kecamatan Cipeundeuy ini dapat menekan angka stunting di Kabupaten Bandung Barat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat model konseptual menggunakan teori Edward II dari aspek; komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Peneliti ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan implementasi kebijakan Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana dalam pencegahan stunting di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat belum berjalan secara maksimal, dalam hal ini terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti dalam sosialisasi, karena masih minimnya kesadaran masyarakat dalam mengetahui efek jangka panjang dari stunting.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Stunting

ABSTRACT. The high rate of stunting in West Bandung Regency is the reason for researchers to study the policy of the Family Planning Technical Implementation Unit in Stunting Prevention in Cipeundeuy District, West Bandung Regency. It is hoped that the implementation of the Family Planning Technical Implementation Unit policy for Stunting Prevention in Cipeundeuy District can reduce stunting rates in West Bandung Regency. The purpose of this study was to find out how the implementation of stunting prevention policies in Cipeundeuy District, West Bandung Regency, uses the conceptual model of Edward II's theory from the aspect; communication, resources, disposition/attitude of implementers, and bureaucratic structure. This researcher uses a qualitative descriptive method. The data collection techniques are observation, interviews, and documentation. Based on the results of the study it can be concluded that the implementation of the Family Planning Technical Implementation Unit policy in preventing stunting in Cipeundeuy District, West Bandung Regency has not run optimally, in this case there are several obstacles in its implementation such as socialization, due to the lack of public awareness in knowing the long-term effects of stunting.

Keywords: Implementation, Policy, Stunting

PENDAHULUAN

Indonesia menduduki peringkat ke lima dunia untuk jumlah anak dengan kondisi *stunting* (MCA-Indonesia, 2017). Stunting merupakan masalah gizi kronis yang merupakan penanganan terintegrasi dan menyeluruh. Presiden Joko Widodo mengungkapkan akan adanya peningkatan stunting disebabkan oleh

pandemi Covid-19 (cnnindonesia, 2021). Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Perpres ini bertujuan untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat prioritas pada seribu hari pertama kehidupan. Sementara di Provinsi Jawa Barat peraturan ini juga termaktub dalam Surat Kepgub Jawa Barat

Nomor.441.05/Kep.829-Bapp/2021 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting di daerah Provinsi Jawa Barat.

Stunting merupakan kondisi kronis buruknya pertumbuhan seorang anak yang merupakan akumulasi dampak berbagai faktor seperti buruknya gizi dan kesehatan sebelum dan setelah kelahiran anak tersebut. Stunting adalah ukuran untuk mengidentifikasi terjadinya kekurangan gizi pada anak dalam jangka panjang. Anak balita yang mengalami stunting bisa menjadi indikator kunci yang sensitif dari kesehatan ibu dan anak. Pertumbuhan linier yang terhambat panjang badan yang tidak sesuai dengan usia akan menghasilkan anak yang stunting serta memengaruhi kemampuan kognitif dan mengurangi potensi akses ke pendapatan yang lebih, resiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir, dan jangka hidup yang lebih pendek sehingga dapat mencerminkan kualitas sumber daya manusia dimana sebagai penentu status gizi masyarakat salah satunya adalah status gizi anak balita (Fikawati et al 2017:279,280).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Stunting

a. Program Percepatan Penurunan Stunting

Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres

ini merupakan payung hukum bagi Strategi Nasional, Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024 dan target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 berdasarkan capaian di tahun 2024. Berdasarkan Lima Pilar Percepatan Penurunan Stunting, akan disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mendorong dan menguatkan konvergensi antar program melalui pendekatan keluarga berseiko stunting. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 juga menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana.

Wakil Presiden menjadi Ketua Pengarah yang didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta menteri-menteri lainnya. Sedangkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana. Tim Percepatan Penurunan Stunting juga dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan.

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab (2004) adalah "Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)"(Webster dalam Wahab, 2004:64).

Teori George C. Edward Menurut pandangan Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- 2) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- 4) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik

METODE

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh pemecahan terhadap berbagai masalah penelitian. Permasalahan yang dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data hasil penelitian tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu proses pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. (HS and Kristian 2021).

Menurut Bogdan dan Taylor (2016) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Melalui pendekatan kualitatif maka penelitian ini ditunjukan keadaan yang sesungguhnya secara rinci dan actual serta disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian, sehingga dalam penelitian dapat ditemukan berbagai jawaban dan dapat mengungkapkan kejadian yang sesungguhnya di lapangan.

Dari beberapa pendapat tokoh tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, dimana peneliti menjadi instrumen kecilnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Margono dalam buku Pengantar Microteaching (2020) karya Uswatun Hasanah mendefinisikan observasi sebagai teknik untuk melihat dan mengamati berbagai perubahan fenomena sosial yang terus tumbuh serta berkembang. Secara singkat observasi merupakan suatu aktifitas mengamati secara langsung ke tempat penelitian.

b. Wawancara

Wawancara memiliki makna sebagai suatu proses tanya jawab antar satu orang dengan lainnya guna dimintai keterangan

atau pendapatnya terkait sesuatu hal. Peneliti sendiri melakukan wawancara langsung dengan salah satu petugas UPT KB Kecamatan Cipeundeuy dan Tim Pendamping Keluarga Desa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan aktivitas pengumpulan, pemilihan. Pengolahan dan penyimpanan suatu informasi sebagai bukti di lapangan. Dokumentasi menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi atau pengamatan ke lapangan secara langsung serta wawancara dalam penelitian kualitatif.

d. Studi Pustaka

Merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode atau teknik pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian dalam (Kartiningrum, 2015)

Studi pustaka menjadi suatu kegiatan wajib dalam penelitian yang bertujuan untuk pengembangan aspek teoritis untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berfikir, dan menentukan hipotesis penelitian.

3. Analisis Data

- 1) Reduksi data, data yang didapatkan dari hasil wawancara bersama kepala Puskesmas Unit Cirata dan jajaran UPT KB
- 2) Penarikan kesimpulan, data yang sudah disusun dan dikelompokkan kemudian disajikan dapat ditarik

kesimpulan, dan kesimpulan inilah yang menjadi informasi dalam penelitian di wilayah Kecamatan Cipeundeuy sehingga para pembaca dapat menemukan kesimpulan dari penelitian (Faizti, 2021)

4. Informan

Informan yang diwawancarai yaitu informan yang paham betul mengenai permasalahan, pencegahan, dan penganggulan stunting yang akan diteliti. Informan yang akan diteliti yaitu:

1. Kepala UPT KBPPA Kec. Cipeundeuy
2. Kepala Puskesmas Cipeundeuy dan Puskesmas Cirata
3. Tim PKK
4. Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis Cipeundeuy merupakan Kecamatan paling barat di Kabupaten Bandung Barat yang terletak sekitar 35 Kilometer dari pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Masyarakat di Kecamatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Purwakarta ini kebanyakan berprofesi sebagai pengusaha dan petani. Komoditas dari kecamatan ini antara lain adalah ikan dari hasil jaring terapung di rendaman Bendungan Cirata yang mana seluruh airnya digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Kecamatan Cipeundeuy memiliki jumlah populasi penduduk pada tahun 2022 adalah 89.226 jiwa (BPS 2022) .

Berdasarkan data kependudukan pada tahun 2022 yang dilihat dari segi kepadatan penduduk sebanyak 2000 jiwa per tahunnya dan dapat dilihat dari segi pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan terus bertambah dari waktu ke waktu.

Desa Bojong Mekar merupakan desa terluas di Kecamatan Cipeundeuy dengan luas wilayah sebesar 24,04 Ha. Secara administratif Desa Bojong Mekar dibatasi oleh:

- 1) Bagian Selatan : Desa Nanggeleng
- 2) Bagian Utara : Desa Cipeundeuy
- 3) Bagian Timur : Desa Jatimekar
- 4) Bagian Barat : Desa Nyenang

1. Implementasi Kebijakan UPT KBPPA Cipeundeuy

Unit Pelaksana Tugas Keluarga Berencana merupakan salah satu instansi pemerintah yang membantu berjalannya kebijakan dalam pencegahan stunting. Implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya terlaksana, hal tersebut dikarenakan masih ada permasalahan seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman dari masyarakat tentang bahayanya stunting bagi tumbuh kembang anak. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti menurut Edward III (dalam Widodo 2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan

atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Adapun penjelasan mengenai ke 4 faktor implementasi kebijakan UPT KBPPA dalam pencegahan stunting di Kecamatan Cipeundeuy adalah sebagai berikut :

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Komunikasi bertujuan untuk memberikan informasi dari pihak yang berwenang kepada pelaksana kebijakan tentang maksud dari implementasi kebijakan. Pelaksana kebijakan pencegahan stunting ini adalah UPT KBPPA, puskesmas, PKK, masyarakat, dan pihak lain di dalam ruang lingkup KBPPA. Pihak UPT KBPPA mempunyai wewenang atau tugas untuk menginformasikan kebijakan pencegahan stunting ini. Komunikasi dalam implementasi kebijakan terdiri dari 3 dimensi, yaitu:

- 1) Dimensi transmisi (transmission)
- 2) Dimensi kejelasan (clarity)
- 3) Dimensi konsistensi (consistency)

a) Dimensi Transmisi

Mengharapkan agar kebijakan kepada sasaran kebijakan agar tujuan dari kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Sosialisasi

menjadi alat komunikasi untuk menyampaikan kebijakan pencegahan stunting.

Kegiatan sosialisasi kebijakan pencegahan stunting ini dilakukan minimalnya 1 bulan sekali. Sosialisasi merupakan sarana komunikasi yang penting karena suatu informasi dalam kebijakan akan tersampaikan dengan baik kepada sasaran dan akan mempengaruhi implementasi. Dari penjelasan tersebut dimensi transmisi dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting dilakukan dengan cara sosialisasi sejak diberlakukannya aturan tersebut.

b) Dimensi Kejelasan

Dalam komunikasi kebijakan menginginkan kebijakan dapat dimengerti oleh implementor dan sasaran kebijakan. Kejelasan yang diterima oleh implementor dan sasaran kebijakan sangat penting agar mengetahui tujuan dan maksud dari kebijakan tersebut. Beberapa masyarakat mengaku tidak tahun akan adanya kebijakan tersebut, tetapi mereka paham bahwa stunting adalah permasalahan gizi serius pada anak.

c) Dimensi Konsistensi

Dalam komunikasi harus adanya suatu komitmen untuk terus melakukan penyuluhan secara konsisten kepada masyarakat. Dengan adanya konsistensi tersebut, lambat laun masyarakat akan memahami

dalam pencegahan stunting dan padam tentang permasalahan gizi pada anak.

b. Sumber Daya

Meskipun kebijakan ini telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan dengan baik. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Sumber daya yang digunakan untuk Peraturan Presiden Tentang Percepatan Penurunan Stunting adalah Tim Pendamping Keluarga (TPK), Tim Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Bidan Desa, dan Pemerintah setempat menjadi bagian dari penyuluh yang memberikan informasi kepada masyarakat.

Sumber daya sarana dan prasarana pun menjadi penunjang agar kebijakan berjalan dengan baik, dari sumber informan yang telah dikatakan dari sisi sumber daya untuk pengimplementasian tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Cipeundeuy sepenuhnya siap dan tersedia.

c. Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen,

kejujuran, sifat demokratis, apabila implementor memiliki sifat yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif.

Gambar 1. Data Aplikasi Elsimil TPK Cipeundeuy

No	Posyandu	TBU			
		Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi
01.00	ADENIUM	0	5	28	0
02.00	ANGGREK	0	0	28	0
03.00	ANYELIR	0	3	28	0
04.00	ASTER	1	3	27	0
05.00	DAHLIA	1	6	34	0
06.00	KENANGA	0	5	27	0
07.00	MAWAR	0	0	25	0
08.00	MELATI	0	1	51	0
09.00	MENTARI	0	1	29	0
10.00	PLAMBOYAN	0	1	51	0
11.00	SEDAP MALAM	0	2	24	0
12.00	SEROJA	1	3	29	0
13.00	TANJUNG	1	0	18	0
14.00	TERATAI	0	0	0	0
JUMLAH		4	30	399	0

Sumber : database Desa Jatimekar 2022

Berdasarkan Gambar 1. Yang menunjukkan jumlah angka data pencapaian target TPK pada penyuluhan di lapangan terhadap keluarga beresiko stunting di Kecamatan Cipeundeuy, bahwasanya masih belum maksimalnya pencegahan stunting di lapangan.

Tabel 1.
Tabel Laporan Jumlah Ukuran Anak di Posyandu.

Berdasarkan data Tabel 1. Hasil menunjukkan dari seluruh Posyandu induk yang ada di Kecamatan Cipeundeuy menunjukkan bahwasanya masih ada hasil dari ukuran tinggi badan anak yang beresiko stunting.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bandung telah memiliki standar dan sasaran kebijakan dalam bentuk Perbup Nomor 9 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting. Setiap *stakeholders* melaksanakan kebijakan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Namun demikian, belum semua pelaksana memahami standar dan sasaran kebijakan. Hal ini disebabkan salah satunya karena sosialisasi belum menyeluruh dilakukan. Selain itu, sosialisasi ke masyarakat juga terhambat akibat pembatasan sosial.
2. Masih terbatasnya SDM dalam implementasi kebijakan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kab. Bandung. SDM khususnya petugas kesehatan yang terlibat dalam penanganan stunting, saat ini dialihkan untuk menangani Covid-19. Selain itu, sarana seperti alat timbang dan alat ukur tidak mungkin dibawa secara langsung ke masyarakat

secara *door to door*. Hal lain adalah terjadinya *refocusing* anggaran pada tahun 2020 menyebabkan berkurangnya alokasi anggaran untuk percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting.

3. Komunikasi antara stakeholders belum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, perubahan metode tatap muka menjadi daring menyebabkan rapat rutin dalam rangka koordinasi pembahasan program dan kegiatan belum maksimal.
4. Sikap pelaksana yang mendukung dan merespon dengan baik kegiatan stunting ini secara konsisten setiap tahunnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan intervensi sesuai dengan tupoksi masing-masing stakeholder.
5. Karakteristik organisasi pelaksana sudah memadai yang ditandai dengan adanya berbagai Surat Edaran yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan.
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Kondisi pandemi Covid 19 telah menurunkan kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam upaya mencegah stunting.

DAFTAR PUSTAKA

Ani, Serli dan Sulistio, Eko budi . 2017. Implementasi Program Jaring (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Nelayan di Provinsi Lampung Tahun 2016. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol. 8 No. 1, Januari-Juni 2017.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2018. Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota. Jakarta : BAPPENAS.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. 2020. Dokumen Analisis Dampak Pandemi Covid-19 pada Program Pencegahan dan Penggulangan Stunting di Kabupaten Bandung. Bandung: Dinas Kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. 2020. Laporan Bulan Penimbangan Balita Tahun 2020. Bandung

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2018, tersedia <https://www.litbang.kemkes.go.id/laporan-riset-kesehatan-dasar-riskesdas/>. 6 Juni, 2020.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 Tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak.

Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, New York: Harper Collins.

Meter, Donald S. Van, dan Carl E. Van Horn. 1975. *Administration & Society. Ohio State University Department of Political Science*. Vol. 6 No. 4, Februari 1975.

Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA-Indonesia), 2017, tersedia <http://www.mcaindonesia.go.id/assets/uploads/media/pdf/BackgrounderStunting-ID.pdf>. 10 Juli, 2017

Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
- Priyanto, Hary dan Noviana, Nana. 2018. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2015.
- Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik Volume 4 No. 1, Juni 2018.
- Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Nomor 441/7590/111/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease-19 (Covid-19).
- Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 441.1/Kep.144-Dinkes/2019 tentang Satuan Tugas Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting dalam Rangka Perbaikan Gizi di Kabupaten Bandung.
- Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 441/Kep.309-Dinkes/2020 tentang Penetapan Desa Lokus Stunting Kabupaten Bandung Tahun 2020